

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Penataan manajemen pemerintah pusat dan daerah (provinsi, kabupaten, kota) adalah salah satu aspek penting dalam reformasi birokrasi. Kebijakan manajemen dapat berhasil bergantung pada kemampuan manajemen dalam birokrasi pemerintahan dalam melaksanakan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien. Aktivitas di instansi pemerintah secara keseluruhan diukur dari segi kinerjanya, baik dari kinerja individual, kinerja unit, kinerja organisasi pemerintah, bahkan kinerja pemerintah keseluruhan.

Penilaian kinerja pada instansi pemerintah dinilai penting untuk dilaksanakan, demi tercapainya peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Keberhasilan kinerja sebuah instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat dapat diukur dari penilaian kinerja. Penilaian kinerja pada instansi pemerintah juga akan memperoleh data dari kinerja pemerintah periode lalu, data ini digunakan untuk mengevaluasi kinerja periode lalu dan menjadikan kinerja pemerintah lebih baik dari periode sebelumnya.

Secara garis besar, kinerja merupakan hasil yang telah dicapai pada periode tertentu oleh sebuah organisasi (Damayanti, 2017). Kinerja pemerintah daerah adalah *output* yang dihasilkan setelah terlaksananya program pemerintah pada satu periode tertentu (Damayanti, 2017).

Sistem pengendalian internal merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah. Sistem Pengendalian Internal menurut Mulyadi (2013) adalah meliputi metode dan ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, struktur organisasi, mengecek keandalan dan ketelitian data akuntansi, mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dan efisiensi. Sistem pengendalian internal dapat mempengaruhi kinerja pemerintah daerah karena sistem pengendalian internal adalah kegiatan yang dilakukan secara berkala dan proses menyeluruh oleh tindakan pimpinan dan personel keseluruhan untuk menyampaikan kepastian atas tercapainya tujuan organisasi melalui tindakan yang efektif dan efisien, proteksi aset negara, kecakapan reportase keuangan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Kinerja pemerintah daerah dapat ditingkatkan apabila tujuan organisasi pemerintah tercapai . Hasil penelitian Nasir dan Oktari (2011) dan Chintya (2015) menemukan bahwa pengendalian internal mempengaruhi kinerja pemerintah daerah.

Kinerja pemerintah daerah juga sangat dipengaruhi oleh pemanfaatan teknologi informasi dari pegawai suatu organisasi. Dengan teknologi maka organisasi akan mengalami perubahan sistem manajemen, dari sistem tradisional ke sistem manajemen kontemporer. Teknologi informasi berkaitan dengan peningkatan pelayanan. Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk masyarakat dengan adanya teknologi informasi akan semakin cepat dan akurat sehingga kinerja pemerintah daerah akan dinilai baik. Damayanti (2017) dan

Chintya (2015) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, menjelaskan pengertian tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu : pemerintahan yang menerapkan dan mengembangkan prinsip-prinsip profesionalitas, demokrasi, efisiensi, efektifitas, pelayanan prima, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Dari uraian tersebut *good governance* mempengaruhi kinerja pemerintah daerah, karena pemerintahan yang dijalankan dengan mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan yang baik merupakan wujud dari penerapan *good governance*, sehingga sumber daya negara yang diolah pemerintah mampu mencapai tujuan semaksimal mungkin untuk kemajuan dan kemakmuran rakyat dan negara. Intihanah dan Muthia S (2017), Azlina dan Amelia (2014) menemukan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara penerapan *good governance* dan kinerja pemerintah daerah.

Penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah memberikan hasil yang tidak konsisten, diantaranya adalah sistem pengendalian internal tidak mempengaruhi kinerja pemerintah daerah (Damayanti, 2017). Namun, hasil yang berbeda diperoleh pada penelitian Nasir dan Oktari (2011) yang membuktikan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Pemanfaatan teknologi informasi tidak mempengaruhi kinerja pemerintah daerah (Damayanti, 2017). Namun, hasil yang berbeda diperoleh pada penelitian Chintya (2015) yang membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif

signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. *Good Governance* tidak mempengaruhi kinerja pemerintah daerah (Hutapea dan Widyaningsih, 2017). Hasil yang berbeda diperoleh pada penelitian Intihanah dan Muthia S (2017) yang membuktikan bahwa *Good Governance* berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Damayanti (2017) yang menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Akuntabilitas Publik berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada OPD Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dengan mengganti variabel akuntabilitas publik dengan variabel *good governance*. Dimana *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) dapat mempengaruhi kinerja pemerintah daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Kinerja pemerintah daerah merupakan hasil yang telah dicapai selama pelaksanaan otonom daerah (Sedarmayanti, 2012). Penelitian tentang kinerja pemerintah sudah pernah dilakukan sebelum-sebelumnya, seperti kinerja pemerintah daerah yang dipengaruhi oleh pengendalian internal (Damayanti, 2017; Nasir dan Oktari, 2011; Chintya, 2015), Pemanfaatan Teknologi Informasi (Damayanti, 2017; Nasir dan Oktari, 2011; Chintya, 2015), *Good Governance* (Intihanah dan Muthia S, 2017; Claraini, 2018; Rumlolas, 2018; Azlina dan Amelia, 2014). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan *Good Governance* terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kinerja pemerintah daerah?
2. Bagaimana pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kinerja pemerintah daerah?
3. Bagaimana pengaruh *good governance* terhadap kinerja pemerintah daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menguji secara empiris :

1. Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kinerja pemerintah daerah.
2. Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kinerja pemerintah daerah.
3. Pengaruh *good governance* terhadap kinerja pemerintah daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi untuk berbagai pihak diantaranya sebagai berikut :

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai kinerja pemerintah daerah. Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian dengan topik yang sama.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai masukan dan pertimbangan bagi pemerintah daerah kabupaten Tegal untuk mengetahui arti pentingnya sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, dan *good governance* dalam peningkatan kinerja pemerintah daerah.